



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
**UNIT KERJA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SUB UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GANJAR PRANOWO**
2. Jabatan : **CALON GUBERNUR**
3. NHK : **35301**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.071.928.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di PURBALINGGA, WARISAN Rp. 241.920.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/21 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/99 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 278 m2 di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 10.008.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 825.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, NISSAN TEANA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 345.861.750****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 4.486.365.332****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	6.729.155.082
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.729.155.082

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Februari 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.